



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BNP2TKI
BADAN POM, BKKBN, DJSN, ASKES, DAN JAMSOSTEK)**

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 26 Januari 2010
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membahas evaluasi kinerja Kementerian Nakertrans Tahun 2010 dan Program Kerja Tahun 2011; 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: dr. Ribka Tjiptaning/ Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota	: 36 orang anggota dari 46 Anggota, 3 orang izin, 1 orang sakit

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja RI dibuka pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menyampaikan paparan sebagai berikut :

A. Kinerja Tahun 2010

a. Realisasi Anggaran berdasarkan unit kerja eselon I (posisi 30 Desember 2010)

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN (Rp 000)	REALISASI		
		(Rp 000)	%	
			KEU	FISIK
SETJEN	318.797.261	287.867.348	90,33	95,50
ITJEN	37.454.272	35.445.187	94,64	102,39
DITJEN BINALATTAS	728.371.123	636.942.694	87,45	96,55
DITJEN BINAPENTA	482.713.711	375.147.322	77,72	88,61
DITJEN PHI dan Jamsos TK	123.853.290	111.880.146	90,33	95,50
DITJEN BINAWASKER	125.124.617	118.645.026	94,82	99,50
DITJEN P2KT	646.861.128	589.871.299	91,19	93,59
DITJEN P2MKT	610.694.225	561.805.002	91,99	93,60
BALITFO	50.127.070	48.313.063	96,38	100
TOTAL	3.123.995.697	2.765.917.090	88,54	

Sumber: Birokeu 2010

Belum optimalnya penyerapan Anggaran Tahun 2010 :

- Revisi DIPA/POK pada awal tahun anggaran di Provinsi Kab/Kota berakibat beberapa kegiatan terlambat dilaksanakan.
- Tingginya frekuensi pergantian KPA di daerah.
- Adanya penambahan anggaran melalui APBN-P yang pelaksanaannya baru sekitar bulan September 2010.
- Proses pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa terhambat karena adanya pemilihan Kepala Daerah.
- Keterlambatan pencairan anggaran yang bersumber dari PNPB berakibat penyerapan rendah.
- Penggunaan dana PNPB dari DP3TKI realisasi penerimaannya 57% sehingga sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan

b. Capaian Sasaran Program

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN (Rp 000)	REALISASI	
		(Rp 000)	%
Penerapan Pemerintah yang baik	459.402.660	405.004.337	88,16
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	24.630.900	24.173.800	98,14
Pengelolaan SDM Aparatur	22.421.200	21.252.157	94,79
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	24.510.500	22.278.966	90,90
Penguatan Kelembagaan IPTEK	29.058.600	28.024.185	96,44
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	664.387.509	571.955.850	86,09
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	289.924.428	273.460.634	94,32
Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	409.770.300	315.550.713	77,01
Pengembangan Wilayah Perbatasan	105.456.000	95.259.026	90,33
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	385.397.700	355.635.832	92,28
Pengembangan Wilayah Tertinggi	709.036.900	653.321.586	92,14
TOTAL	3.123.996.697	2.765.917.090	88,54

Sumber: Birokeu 2010

c. Penghargaan dan Kerjasama

i. Penghargaan

Memperoleh penghargaan dari Asean Skill Competition (ASC) VII di Bangkok; Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI untuk Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri Bandung; Piagam Pratama Bidang Pelayanan Prima dari Kementerian MENPAN dan Reformasi Birokrasi untuk Balai Latihan Kerja Semarang dan LAKIP Kemenakertrans tahun 2009 memperoleh ranking ke 13 dari 74 Kementerian/Lembaga Pemerintah.

ii. Kerjasama (MoU)

MoU antara Kemenakertrans dengan UGM tentang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan serta Pendampingan Bidang Nakertrans; MoU antara Kemenakertrans dengan Kemen. Kop dan UKM, Kemen. Perindustrian, Kemen. Kelautan dan Perikanan serta Kemenpora tentang Perluasan Kesempatan Kerja Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha; dan MoU dengan Kemen. PU tentang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Perdesaan melalui Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi.

- B. Kegiatan Prioritas sesuai Inpres No.3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan
- Keadilan untuk semua (*JUSTICE FOR ALL*)
 - Pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals-MDG'S*)

C. Rencana Kerja Tahun 2011

BIDANG KETENAGAKERJAAN

- Rendahnya Mutu dan Kompetensi SDM :
 - Angkatan Kerja masih didominasi lulusan SD ke bawah : 57,44 jt (49,52%).
 - Peringkat Produktivitas : Indonesia No 59 dari 61 negara (*World Economic Forum Reports 2009*).
 - Peringkat Daya Saing : Indonesia No 35 dari 131 negara (*IMD World Competitiveness Yearbook 2010*).
 - Index Pembangunan Manusia : Indonesia menduduki ranking ke-111 dari 180 anggota PBB (dari 192 negara).
- Besarnya pengangguran dan setengah pengangguran.
 - Jumlah penganggur : 8,32 juta (7,14%).
 - Jumlah setengah penganggur : 33,27 juta (30,75%).
- Semakin bertambahnya angkatan kerja di daerah perkotaan.
- Belum link and match (masih output oriented belum job oriented) antara dunia kerja dan dunia pendidikan.
- Minimnya pendidikan/keterampilan kewirausahaan (*enterpreneur*) bagi angkatan kerja sehingga kurang mampu membuka lapangan kerja.
- Pelatihan kerja belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
- Peraturan ketenagakerjaan yang tidak nyaman bagi pekerja dan pengusaha.
- Belum optimalnya penempatan, perlindungan dan pemberdayaan TKI.
- Kualitas dan kuantitas pegawai pengawasan ketenagakerjaan masih rendah.

BIDANG KETRANSMIGRASIAN

- Tuntutan pengembalian hak atas tanah (*reclaiming action*, garapan dan ulayat/adat) mengingat di beberapa lokasi dalam pelaksanaan belum sepenuhnya didukung aspek legal.
- Transmigrasi selama ini belum sepenuhnya berorientasi pada pengembangan kawasan sehingga belum mampu berkontribusi pada pertumbuhan kawasan yang lebih luas. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi relatif lambat.
- Potensi sumberdaya di wilayah tertinggal dan perbatasan (termasuk pulau kecil terdepan) relatif besar, namun belum dikelola secara optimal karena terbatasnya SDM, anggaran, aksesibilitas, dan keterpaduan program lintas sektor.
- Animo bertransmigrasi sangat besar (260 ribuan keluarga), sementara yang ditransmigrasikan relatif kecil (44.233 Keluarga /5 tahun).
- Terbatasnya anggaran pemerintah untuk membangun dan mengembangkan kawasan tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar melalui penyelenggaraan transmigrasi.
- Ketersediaan sarana pendidikan yang terbatas belum memenuhi kelengkapan paket standar pendidikan.

- vii. Pendidikan formal, non formal dan informal yang dilaksanakan belum dapat diterapkan di semua permukiman transmigrasi dan belum mampu mendorong pengembangan kegiatan ekonomi yang didasarkan atas kreativitas, keterampilan, dan bakat individu.
- viii. Belum tersedianya kelembagaan pendampingan masyarakat yang mendukung penciptaan transmigran kreatif dalam pengembangan ekonomi lokal.
- ix. Belum terpenuhinya paket sarana dan prasarana di permukiman transmigrasi sesuai norma standar.
- x. Masih rendahnya kapasitas SDM bidang ketransmigrasian di daerah.

Pagu Definitif Kemenakertrans Tahun 2011 berdasarkan SE Menkeu No.SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian/Lembaga Tahun 2011, Total Pagu sebesar Rp 4.128.286.700.000,-

2. Untuk perlindungan bagi TKI, Kemenakertrans RI perlu meratifikasi konvensi ILO tentang buruh migrant dan keluarganya, mengingat Negara Indonesia banyak mengirim TKI ke luar negeri, memperhatikan standarisasi pelayanan kesehatan bagi TKI serta berperan dan bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak TKI di luar negeri (Malaysia).
3. Program transmigrasi selain untuk mengatasi kepadatan penduduk di daerah tertentu juga untuk mengatasi pengangguran, Kemenakertrans RI hendaknya mengoptimalkan program transmigrasi dengan meningkatkan anggaran sektor ketransmigrasian dan mengoptimalkan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja di daerah transmigrasi, untuk itu Kemenakertrans perlu berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
4. Program Kemenakertrans dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) hendaknya tidak merupakan program pencitraan saja, tetapi aplikasi di masyarakat agar dipermudah persyaratannya mengingat banyak pekerja yang tidak memiliki agunan.
5. Dalam meningkatkan kualitas BLK dan pesebarannya hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah serta pasar kerja. Untuk didaerah-daerah tertentu perlu dilakukan pengkhususan BLK untuk bidang tertentu, misalnya untuk provinsi Bali, ada BLK Khusus bidang pariwisata.
6. Kemenakertrans RI perlu membuat klasifikasi pekerjaan pada perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, karena banyak pekerjaan yang sebenarnya dapat dikerjakan oleh Tenaga Kerja Indonesia namun dikerjakan oleh Tenaga Kerja Asing, hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak Negara dan mengurangi kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia.
7. Pada umumnya perselisihan pekerja dengan manajemen di perusahaan-perusahaan oleh karena sistem pengupahan di bawah standar, dibatasinya kebebasan berserikat (union busting) dan PHK secara sepihak. Hal ini akibat dari lemahnya pengawasan, oleh karena itu Kemenakertrans hendaknya menambah dan menempatkan tenaga pengawas ketenagakerjaan sesuai komposisi yang ideal antara tenaga pengawas dengan perusahaan yang ada. Kemenakertrans agar menyampaikan data penanganan kasus-kasus PHI yang telah diselesaikan dan yang belum diselesaikan.

8. Kemenakertrans RI perlu memperhatikan kontribusi peran swasta dalam mengelola kawasan transmigrasi, misalnya di KTM Sambas Perkasa, Kalimantan Barat, hal ini untuk mengurangi egosektoral dari Pemerintah Daerah.
9. Kemenakertrans harus bertanggung jawab terhadap masalah pemulangan TKI yang sudah lewat batas waktu tinggal (overstay) yang berada di bawah jembatan Kandara Jeddah, Arab Saudi ke Indonesia.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mengharapkan peningkatan kinerja dari Kemenakertrans RI, dengan memberikan catatan bahwa belum optimalnya penyerapan Anggaran Tahun 2010 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.123.995.697.000 (trilyun) yang terserap sebesar Rp. 2.765.917.090.000 (trilyun) atau sebesar 88,54% dari total pagu, menunjukkan bahwa penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja Tahun 2010 termasuk dalam hal pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 dan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, belum maksimal dan belum bersinergis dengan kondisi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
2. Komisi IX DPR RI mendorong Kemenakertrans RI untuk menyusun skala prioritas Program Kerja yang terkait langsung dengan peningkatan kesempatan kerja, upaya perlindungan dan advokasi tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri, serta pembenahan dan penanganan para keluarga transmigran di daerah transmigrasi, dengan mengoptimalkan penyerapan Pagu Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp. 4.128.286.700.000 (trilyun).
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans RI agar memiliki *blueprint* penyelesaian masalah-masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sehingga kasus-kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, serta kasus-kasus di daerah transmigrasi, dapat diantisipasi dan diselesaikan secara maksimal dan bertanggung jawab.
4. Komisi IX DPR RI meminta Kemenakertrans RI untuk menyerahkan data-data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, terutama data sebaran BLK dengan kondisi bangunannya, data TKI di luar negeri dan PPTKIS, data buruh yang masih bekerja dan yang diPHK, data lembaga outsourcing, data kasus PHI yang sudah dan yang belum diselesaikan, data perundang-undangan yang belum dibuat oleh Kemenakertrans RI, data perusahaan yang sehat dan tidak sehat, serta data pemetaan daerah transmigrasi dan KTM di seluruh Indonesia. Data-data ini diserahkan kepada Komisi IX DPR RI pada minggu kedua Februari 2011.

Rapat diakhiri pukul 16.05 WIB

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Ketua



dr. RIBKA TJIPTANING